

Gagasan Wisata Halal dan Perkembangan Lubang Buaya Morella dengan Konsep TALC

Halal Tourism Ideas and Development of Lubang Buaya Morella with the TALC Concept

Fitria Karnudu, Muammar Wijayanto Maruahey

ABSTRACT

Maluku Province has the most complete and potential tourism objects, including historical tourism, spiritual tourism, nature tourism, and cultural tourism. This study aims to explore the feasibility of the idea of halal tourism in the tourist destination of Lubang Buaya Morella Beach and how it develops and exists. The Tourism Area Life Cycle (TALC) model shows that tourist destination areas constantly change from time to time, and their development can be seen from the stages of introduction to decline. The conclusion of this study shows that tourism at Lubang Buaya Morella Beach is still in the exploration stage. This can be seen from the decreasing income level of the people around the tourist sites, and the socio-economic activities of the community are still straightforward. The local government must increase serious attention to how existing tourist destinations (marine tourism, history, and cultural tourism) can be preserved by protecting the environment from damage, maintaining cleanliness, and preserving ancestral culture and historical sites for future generations.

Keywords: halal tourism, TALC, Lubang Buaya Morella

ABSTRAK

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki obyek wisata yang terlengkap dan potensial di antaranya wisata sejarah, wisata rohani, wisata alam, dan wisata budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kelayakan dari gagasan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Lubang Buaya Morella dan bagaimana perkembangan dan eksistensinya. Dengan Model Tourism Area Life Cycle (TALC) menunjukkan bahwa daerah destinasi wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan perkembangannya dapat dilihat dari tahapan-tahapan mulai dari pengenalan sampai penurunan. Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa pariwisata di Pantai Lubang Buaya Morella masih berada dalam tahapan eksplorasi (*exploration*). Hal ini dapat dilihat dengan semakin menurunnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisata, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat masih sangat sederhana. Perhatian serius dari Pemerintah Daerah harus ditingkatkan untuk bagaimana destinasi wisata yang ada (wisata bahari, sejarah, dan wisata budaya) dapat dilestarikan dengan menjaga lingkungan dari kerusakan, menjaga kebersihan, melestarikan budaya leluhur, dan situs-situs sejarah untuk generasi yang akan datang.

Kata Kunci: wisata halal, TALC, Lubang Buaya Morella



JIHBIZ

Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking

P-ISSN 1238-1235 | E-ISSN 2807-6028

Vol. 6 No. 2 2022

Page 140-152

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan
Program Studi Perbankan Syariah
Universitas Islam Raden Rahmat,
Malang, East Java, Indonesia

Website:

<http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/>

Article's DOI:

<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1647>

Author(s):

Fitria Karnudu

Email: fitria17@gmail.com

Muammar Wijayanto Maruahey

Email: muammarmaruapey@gmail.com

Affiliation:

*Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam, IAIN Ambon,
Maluku, Indonesia*

Correspondence:

fitria17@gmail.com

Article Type: Literature Review

Submission's History:

Received	:	9 July 2022
Revised	:	11 July 2022
Accepted	:	21 July 2022

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan di samping industri kecil dan agroindustri, karena merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan devisa dan sekaligus diharapkan akan memperluas dan menciptakan kesempatan kerja serta menciptakan usaha bagi masyarakat. Kemajuan pariwisata dan pembangunan suatu daerah memiliki hubungan saling ketergantungan, artinya semakin maju sektor pariwisata, maka akan semakin besar kontribusi yang akan diberikan sektor pariwisata kepada pemerintah daerah tersebut, sebaliknya semakin maju pembangunan suatu daerah maka sudah barang tentu tersedia sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan pariwisata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lebih dari itu dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik.

Pengembangan pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi, upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga dan melestarikan kekayaan alam dan hayati. Diharapkan pengembangan pariwisata dapat berpengaruh baik bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat lokal dan mampu mendorong pengembangan berbagai sektor lain baik ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, maka pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki obyek wisata yang terlengkap dan potensial di antaranya wisata sejarah, wisata rohani, wisata alam, dan wisata budaya. Kondisi Provinsi Maluku tahun 2015 menunjukkan arus wisatawan yang datang ke Maluku mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan yang datang pada tahun 2015 mencapai 17.820 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2013 hanya 15.603 orang (BPS, 2015). Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, Pemerintah Daerah mencanangkan program “Mangente Ambon” untuk menarik minat masyarakat domestik maupun mancanegara bahwa di Ambon khususnya dan daerah di sekitar Kota Ambon memiliki kawasan wisata yang potensial dan aman untuk dikunjungi.

Desa Morella adalah salah satu desa di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang kaya akan obyek wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata rohani. Proses pembangunan dan pengembangan desa wisata Morella merupakan bagian dari pengembangan ekowisata. Secara konseptual ekowisata dapat diartikan sebagai konsep pengembangan dengan tujuan mendukung upaya pelestarian lingkungan alam maupun budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Destinasi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, dan wisata rohani digagas menjadi sebuah destinasi yang dalam studi ini disebut sebagai wisata

halal. Gagasan wisata halal yang menurut temuan penelitian Hana et al. (2022) bahwa obyek wisata halal perlu meningkatkan fasilitas dan norma subjektif yang dapat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kelayakan dari gagasan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Lubang Buaya Morella dan bagaimana perkembangan dan eksistensinya. Sehingga diketahui dampak dari aktivitas pariwisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Morella.

2. Kajian Pustaka

2.1 Konsep TALC dalam Pengembangan Pariwisata

Saat ini pariwisata sering kali dipersepsikan sebagai mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pariwisata sebagai sebuah alternatif pembangunan pengganti sektor agraris. Munculnya isu pengelolaan pariwisata berkelanjutan merupakan hal yang dinamis baik dalam skala makro maupun mikro. Konsep pembangunan berkelanjutan menurut Murphy (dalam Teobald, 2004) adalah adanya hubungan antara ekonomi dan lingkungan serta memiliki hubungan yang sangat erat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dianggap sesuatu yang logis, mengingat bahwa pariwisata merupakan salah satu industri yang produknya menjual lingkungan. Konsep destinasi pariwisata merupakan salah satu yang paling penting dan kompleks dalam pembahasan pariwisata. Gunn dan Var (1994) melihat destinasi pariwisata sebagai area pasar perjalanan wisata dan merujuk pada zona tujuan perjalanan yaitu area geografis yang meliputi pembangunan wilayah dan masyarakat dalam rangka memuaskan tujuan perjalanan wisatawan. Oleh sebab itu destinasi pariwisata dapat dijelaskan pada skala yang berbeda mulai dari level desa sampai dengan wilayah, kota atau resor, situs khusus dan bahkan hanya berujud atraksi khusus yang dikunjungi wisatawan.

Teori tentang siklus hidup destinasi pariwisata memperoleh perhatian luas dengan seringnya model ini digunakan sebagai alat untuk membantu memetakan dampak perkembangan destinasi pariwisata. Butler (1980) menyusun konsep tentang perkembangan destinasi pariwisata. Destinasi akan berkembang menurut model siklus dimulai dari tidak adanya aktivitas wisata (*nil tourism*) sampai dengan pembangunan masif dalam bentuk eksploitasi massal (*massive development*) dan selanjutnya terjadi kejenuhan dan penurunan. Konsep ini digunakan sebagai basis analisis dengan melihat karakteristik perkembangan menggunakan lima atribut destinasi pariwisata.

Model Tourism Area Life Cycle (TALC) (Butler, 1980) adalah salah satu kerangka kerja konseptual dan manajerial yang paling kuat dan banyak digunakan di kawasan pariwisata. Konsep siklus hidup menunjukkan bahwa daerah tujuan wisata senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan perkembangannya dapat dilihat dari tahapan-tahapan mulai dari pengenalan sampai penurunan. Dengan pengelolaan yang baik pariwisata dapat berperan untuk memberdayakan sumber daya yang langka serta menjadikan industri pariwisata dapat diperpanjang siklus hidupnya (Theobald, 2004).

Pendekatan siklus hidup dikembangkan dengan baik dalam pemasaran dan semakin banyak diadopsi untuk menjelaskan tujuan pembangunan pariwisata dengan melihat siklus hidup pariwisata tersebut. TALC menyediakan alat deskriptif yang berguna untuk menganalisis

perkembangan tujuan dan evolusi pariwisata. Butler (1980) menggambarkan perkembangan destinasi pariwisata melalui proses perkembangan yang dimulai dari fase eksplorasi, pelibatan, pertumbuhan, konsolidasi, stagnasi dan penurunan. Masing-masing fase tersebut dicirikan oleh perkembangan beberapa atribut destinasi yaitu jumlah wisatawan, daya dukung dan jumlah pengunjung maksimum di tempat tujuan (Butler, 1999, 2009; McCool & Kapur, 2001; Mexa & Coccosis, 2004), akomodasi, objek dan atraksi wisata, aksesibilitas, dan amenitas pariwisata. Wilkinson (2003) meninjau beberapa definisi formal tentang daya dukung, bukti fisik, perseptual, ekonomi, dan institusional, menegaskan bahwa tidak ada kemajuan nyata bagaimana menerapkan konsep dalam praktik dan pemahaman prinsip pariwisata.

Butler (2005) mengamati bahwa daya dukung memiliki beberapa komponen dan bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi sebagai salah satu sistem pengelolaan pariwisata secara komprehensif. Brougham & Butler (1972, p. 6) salah satu faktor penghambat pengembangan pariwisata adalah kurangnya fasilitas pendukung. Daya dukung dan minimnya fasilitas di daerah tujuan wisata merupakan kolaborasi yang sulit di antara faktor-faktor yang secara empiris tampak, namun secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap intensitas aktivitas wisata. Penelitian ini hanya melihat data jumlah kunjungan wisata, perkembangan perhotelan, dan tingkat hunian kamar selama beberapa periode yang diperoleh dari data publikasi Maluku dalam Angka Tahun 2006 sampai dengan 2016.

2.2 Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Dampak suatu proyek pembangunan pada aspek sosial ekonomi khususnya untuk negara berkembang terdapat pada komponen-komponen berikut yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi antara lain: 1) penyerapan tenaga kerja; 2) berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktivitas perekonomian lain akibat proyek tersebut seperti toko, warung, restoran, transportasi dan lain-lain; 3) peningkatan pendapatan masyarakat; 4) kesehatan masyarakat; 5) persepsi masyarakat; 6) pertambahan penduduk dan lain sebagainya (Suratmo, 2004).

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Dampak sosial muncul ketika terdapat aktivitas proyek, program atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. Untuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif

Pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa berbagai manfaat bagi masyarakat lokal di daerah. Di antara manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, antara lain: terjadinya sosialisasi antar orang dengan karakteristik yang berbeda, berbagai bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik, dan tingkat perekonomian. Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan atau meningkatkan pendapatan. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan usaha yang dapat dikembangkan, dan membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha lain. Manfaat yang lain adalah pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran, karena wisatawan membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya. Hal tersebut akan mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara.

Dampak positif pengembangan pariwisata yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas pengembangan pariwisata tersebut yakni berupa pajak daerah maupun bukan pajak lainnya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi berupa pertukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Menurut Spillane (1987) belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*). Di mana di daerah pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan suvenir. Dengan demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut.

2.3 Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata

Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran serta masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial atau struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendalikan dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat manusiawi (Riyadi, 1982). Pembangunan itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur. Dalam praktiknya proses pembangunan itu berlangsung melalui siklus produksi untuk mencapai suatu konsumsi dan pemanfaatan segala macam sumber dan modal, seperti sumber alam, sumber daya manusia, sumber keuangan, permodalan dan peralatan yang terus menerus diperlukan dan perlu ditingkatkan.

Riyadi (1982) mengungkapkan bahwa keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi menurut adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya (Riyadi, 1982). Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian keadaan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis tempat tinggal.

Dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata merupakan perubahan mendasar yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap kondisi masyarakat, seperti misalnya peningkatan atau penurunan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Dampak ekonomi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama, dampak langsung adalah nilai dari pengeluaran wisatawan dikurangi nilai impor untuk penyediaan produk dan jasa pada "front-line" bisnis. Kedua, dampak tidak langsung adalah aktivitas ekonomi lokal dari pembelanjaan unit usaha penerima dampak langsung. Ketiga, dampak *induced* adalah aktivitas ekonomi lokal lanjutan dari tambahan pendapatan lokal (dampak lanjutan dari dampak langsung dan dampak tidak langsung).

Menurut Cohen (1974), dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat di kategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu: a) Dampak terhadap penerimaan devisa; b) Dampak terhadap pendapatan masyarakat; c) Dampak terhadap kesempatan kerja; d) Dampak terhadap harga-harga; e) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan; f) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol; g) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya; h) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Dampak terhadap penerimaan devisa dan pendapatan pemerintah merupakan aspek yang tidak diperhitungkan dalam menganalisis dampak dari suatu tempat wisata yang relatif kecil. Sehingga pada tempat-tempat wisata yang relatif kecil, dampak yang ingin dilihat adalah pada aspek pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga-harga, distribusi manfaat, kepemilikan dan kontrol serta pembangunan sekitar tempat wisata.

2.4 Wisata Halal

Secara umum wisata halal dianggap sebagai sub kategori wisata religi. Kata Halal berasal dari bahasa Arab yang artinya: diperbolehkan, dapat diterima, diizinkan, dan/atau diizinkan. Kata ini adalah sumber utama konsep halal yang tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan (seperti yang kebanyakan orang harapkan atau pikirkan), tetapi melampaui makanan untuk mencakup semua aspek kehidupan seorang Muslim (laki-laki atau perempuan). Dalam hal ini konsep Halal dibangun di sekitar kebutuhan setiap Muslim untuk memiliki produk yang diperbolehkan, dapat diterima, diizinkan, dan diizinkan dari sudut pandang agama (El-Gohary, 2016). Dengan demikian, konsep halal mencakup semua produk yang sesuai dengan syariah Islam yang dimulai dengan makanan dan minuman dan beralih darinya ke perbankan dan keuangan, pariwisata, kosmetik, pekerjaan, layanan perjalanan dan transportasi, dll.

Wisata halal mengacu pada penyediaan produk dan jasa pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim untuk memfasilitasi ibadah dan persyaratan lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Mohsin et al. (2016) mendefinisikan wisata halal adalah jenis wisata yang menganut nilai-nilai Islam, dan dalam hal ini perbandingan dapat dibuat dengan pertumbuhan praktik perbankan Islam di mana keduanya mengizinkan anggota agama untuk berhasil menjadi bagian dari dunia kontemporer yang konsisten. dengan cara, nilai dan praktik yang sesuai dengan hukum syariah.

Bon dan Hussain (2010) mengusulkan bahwa wisata halal adalah sub tipe dari wisata religi. Adalah pariwisata yang dilakukan oleh para pengikut Islam; para pengikut ini menjalani hidup mereka dengan hukum syariah. Mengikuti hukum syariah adalah cara untuk menjadi Halal. “halal” adalah kata Arab yang berarti, “dikenal” bagi umat Islam dan karena itu berhubungan dengan bentuk perilaku yang disetujui dan diizinkan. Dengan demikian, pariwisata halal pada dasarnya berkaitan dengan wisata berorientasi Muslim, yang dirancang untuk memenuhi pertimbangan dan kebutuhan Muslim, di mana para wisatawan mematuhi hukum syariah sebagaimana difasilitasi oleh penyedia wisata. Meskipun komunitas Muslim global sangat beragam atas dasar politik, sosial dan sejarah; keyakinan inti yang berkaitan dengan konsep halal dan haram tetap sama.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) sebagai metodologinya. Penelitian lapangan juga dapat mengandalkan serangkaian metodologi yang beragam termasuk penelitian tindakan, penelitian berbasis kasus, analisis isi atau tekstual, etnografi, eksperimen, dan analisis statistik dari kumpulan data primer atau sekunder yang dikumpulkan oleh penulis (Dehoratius & Rabinovich, 2011). Penelitian lapangan yang menggunakan analisis statistik dari kumpulan data sekunder dapat menjawab, misalnya, pertanyaan penelitian yang telah dimotivasi oleh pengamatan yang mendalam, spesifik perusahaan atau industri. Fisher (2007) menawarkan taksonomi rinci penelitian empiris dalam manajemen operasi yang menyoroti berbagai metodologi penelitian yang biasanya digunakan.

Penelitian lapangan ini mencoba untuk menemukan kelayakan dari gagasan wisata halal pada destinasi wisata Pantai Lubang Buaya Morella dan bagaimana perkembangan dan eksistensinya. Sehingga diketahui dampak dari aktivitas pariwisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Morella.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dampak Ekonomi Kegiatan Wisata Pantai Lubang Buaya Morella

Dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata merupakan perubahan mendasar yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut terhadap kondisi masyarakat, seperti misalnya peningkatan atau penurunan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Dampak ekonomi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dampak langsung adalah nilai dari pengeluaran wisatawan dikurangi nilai impor untuk penyediaan produk dan jasa pada “*front-line*” bisnis. Dampak ekonomi langsung merupakan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat (Vanhove, 2005). Ketika pengunjung mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan permintaan terhadap produk dan jasa di tingkat lokal dan pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal yang bekerja di lokasi itu. Demikian juga halnya dengan upaya perlengkapan sarana dan prasarana wisata yang dilakukan pemerintah, pada akhirnya bertujuan menciptakan pendapatan, kesempatan kerja dan penerimaan pajak bagi wilayah tersebut.

Dampak tidak langsung adalah aktivitas ekonomi lokal dari pembelanjaan unit usaha penerima dampak langsung. Dampak *induced* adalah aktivitas ekonomi lokal lanjutan dari tambahan pendapatan lokal (dampak lanjutan dari dampak langsung dan dampak tidak langsung). Dampak ekonomi yang dihasilkan oleh sektor pariwisata umumnya diukur dari keseluruhan pengeluaran pengunjung untuk keperluan akomodasi, konsumsi, perjalanan, dokumentasi dan keperluan lainnya. Jumlah dari seluruh pengeluaran itu diestimasi dari jumlah total hari kunjungan dari pengunjung dan juga pengeluaran rata-rata per hari dari pengunjung.

4.2 Dampak Ekonomi Langsung (*Direct Impact*)

Pengunjung membutuhkan berbagai keperluan dalam kegiatan rekreasinya, di antaranya akomodasi, konsumsi alat, souvenir dan lain-lain. Jika kebutuhan para pengunjung ini dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal, maka akan terjadi transaksi ekonomi antara pengunjung dan masyarakat lokal. Hal ini berarti terjadi arus uang dari luar objek wisata ke dalam objek wisata. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka akan menciptakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal yang mempunyai usaha di lokasi wisata ini. Dampak ekonomi dari kegiatan wisata di objek wisata Pantai Lubang Buaya tercipta dari aliran uang yang berasal dari transaksi antara pengunjung dan masyarakat lokal yang mempunyai usaha di objek wisata ini.

Berdasarkan sebaran responden pengunjung di objek wisata Pantai Lubang Buaya menurut struktur pengeluaran pada satu tahun terakhir, biaya perjalanan mempunyai proporsi terbesar dari seluruh struktur pengeluaran pengunjung. Hal ini disebabkan pengunjung yang khususnya berasal dari luar daerah Morella dan sekitarnya, harus menempuh jarak sekitar satu jam untuk sampai ke objek wisata ini. Hal ini berpengaruh pada biaya perjalanan yang mereka keluarkan untuk menuju ke lokasi objek wisata. Bagi pengunjung yang menggunakan kendaraan umum, biaya perjalanan merupakan biaya yang dikeluarkan selama pulang-pergi. Sedangkan bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, maka biaya ini adalah biaya untuk bahan bakar. Menurut Molden (2001), tidak semua pengeluaran pengunjung dilakukan di objek wisata, ada sebagian dari pengeluarannya yang berasal dari luar objek wisata yang disebut dengan kebocoran ekonomi (*economic leakage*).

Proporsi pengeluaran yang dilakukan oleh pengunjung terkait dengan unit usaha dan fasilitas rekreasi yang tersedia di lokasi. Rata-rata pengeluaran pengunjung untuk satu kali kunjungan berkisar antara Rp25.000-Rp175.000. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah rombongan, daerah tempat tinggal, aktivitas utama yang dilakukan di lokasi dan lain-lain. Besarnya arus uang akan menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang berasal dari pengeluaran pengunjung.

Keberadaan objek wisata membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk membuka usaha yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pengunjung selama berada di lokasi. Walaupun unit usaha di Pantai Lubang Buaya sebagian besar merupakan unit usaha berskala kecil dan hanya ramai dikunjungi pada akhir pekan dan hari libur, namun unit usaha yang ada cukup untuk mendatangkan pendapatan. Hal ini menimbulkan perputaran uang yang terjadi antara pengunjung dan masyarakat lokal yang mempunyai usaha di lokasi. Unit usaha yang ada adalah warung, kios, penyewaan jasa (perahu dan walang), penjual keliling dan toilet.

Pendapatan yang dihasilkan oleh pemilik unit usaha yang merupakan pengeluaran dari pengunjung digunakan kembali untuk menjalankan aktivitas unit usaha tersebut. Usaha ini membutuhkan modal baik yang berasal dari lokasi wisata ataupun dari luar lokasi wisata. Pedagang membutuhkan perputaran uang yang baik, berhubung belum ada bantuan dari pihak perbankan dalam membiayai usaha yang dikelola oleh pedagang. Menurut pedagang sudah ada pihak perbankan yang melakukan survei lokasi, akan tetapi sampai saat ini belum ada tindak

lanjutnya. Komponen biaya yang utama dari unit usaha ini adalah biaya pembelian *input*, biaya pemeliharaan, biaya operasional unit usaha, kebutuhan pangan harian. Proporsi untuk upah tenaga kerja pada objek wisata ini sangat rendah yaitu 0,02%. Hal ini dikarenakan sebagian besar tenaga kerja adalah masyarakat lokal, dan sebagian besar pedagang menjaga sendiri dagangannya, sehingga biaya ini sangat kecil dikeluarkan.

4.3 Dampak Ekonomi Tidak Langsung (*Indirect Impact*)

Keberadaan objek wisata Pantai Lubang Buaya membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk usaha di lokasi ini. Sehingga hal ini juga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi mereka. Walaupun sebagian besar unit usaha di lokasi ini dikelola langsung oleh pemiliknya, namun ada beberapa yang menggunakan tenaga kerja. Umumnya dari setiap unit usaha hanya dibutuhkan tenaga kerja 1-2 orang. Sedangkan pedagang keliling dikelola sendiri oleh mereka.

Kesempatan kerja yang tercipta cenderung hanya hari libur dan akhir pekan, namun hal ini tetap memberikan dampak kepada tenaga kerja lokal yang ada di lokasi ini. Hal ini disebabkan karena memang sebagian besar dari tenaga kerja di objek wisata ini merupakan masyarakat lokal Desa Morella. Salah satu tujuan dibukanya objek wisata ini dalam rangka usaha pemberdayaan masyarakat lokal sekitar. Tenaga kerja lokal merupakan pihak yang secara tidak langsung mendapatkan dampak ekonomi dari keberadaan objek wisata ini yaitu melalui pendapatan yang mereka dapat dari pemilik unit usaha.

Dampak ekonomi tidak langsung dapat dihitung dari proporsi pengeluaran unit usaha terhadap penerimaan. Proporsi upah tenaga kerja terhadap penerimaan unit usaha, nilainya cukup rendah yaitu nol sampai dua persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari unit usaha di lokasi ini dikelola oleh pemilik. Hal ini disebabkan karena minat masyarakat terhadap wisata alam khususnya wisata bahari cukup tinggi. Dapat dilihat dari rata-rata jumlah kunjungan per bulan. Walaupun aktivitas hanya ramai pada akhir pekan dan hari libur, namun dampak yang dirasakan cukup baik bagi masyarakat lokal yang bekerja di lokasi. Tetapi sebaiknya dilakukan peningkatan dalam pengelolaan agar penerimaan yang diperoleh tenaga kerja juga semakin baik. Warung merupakan unit usaha yang paling tinggi menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini disebabkan karena jumlah jam kerjanya yang lebih panjang, bahkan ada yang tinggal di objek wisata tersebut.

4.4 Dampak Ekonomi Lanjutan (*Induced Impact*)

Kegiatan wisata tidak hanya menghasilkan dampak langsung dan tidak langsung, tetapi juga menghasilkan dampak *induced*. Dampak ini merupakan dampak lanjutan dari pengeluaran yang dilakukan oleh tenaga kerja lokal di objek wisata ini. Dampak ini berasal dari pengeluaran sehari-hari tenaga kerja lokal. Sebagian besar dari proporsi pengeluaran tenaga kerja digunakan untuk kebutuhan pangan yaitu sebesar 65,90%. Setelah itu digunakan untuk biaya transportasi yaitu sebesar 22,30%. Sisanya digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti biaya listrik, jajan anak dan lain-lain.

Proporsi untuk retribusi tidak ada karena memang objek wisata ini tidak mengeluarkan biaya untuk retribusi. Nilai efek pengganda (*multiplier*) dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak ekonomi dari pengeluaran pengunjung yang digunakan selama mereka

melakukan kegiatan rekreasi. Berdasarkan META (2001) terdapat dua ukuran dalam mengukur dampak ekonomi pariwisata di tingkat lokal yaitu:

- a. *Keynesian Local Income Multiplier*, yaitu nilai yang menunjukkan berapa besar pengeluaran pengunjung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal; dan
- b. *Ratio Income Multiplier*, yaitu nilai yang menunjukkan seberapa besar dampak langsung yang dirasakan dari pengeluaran pengunjung berdampak terhadap perekonomian lokal. Pengganda ini mengukur dampak tidak langsung dan dampak lanjutan (*induced*).

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menentukan besarnya dampak ekonomi di objek wisata Pantai Lubang Buaya Morella didapat nilai *Keynesian Income Multiplier* yaitu sebesar 1,46 yang artinya peningkatan pengeluaran pengunjung sebesar 1 rupiah akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal sebesar 1,46 rupiah. Dampak ekonomi lanjutan dari pengeluaran pengunjung dirasakan oleh pemilik unit usaha berupa keuntungan yang diterima.

Selanjutnya dampak ekonomi dirasakan juga oleh tenaga kerja lokal di objek wisata yaitu berupa upah yang mereka dapatkan dari pemilik unit usaha. Nilai *Ratio Income Multiplier* Tipe 1 adalah 1,38 yang artinya peningkatan 1 rupiah pendapatan pemilik usaha akan mengakibatkan peningkatan sebesar 1,38 rupiah pada dampak langsung dan tidak langsung (berupa pendapatan pemilik unit usaha dan tenaga kerja lokal). Selanjutnya diperoleh nilai *Ratio Income Multiplier* Tipe 2 sebesar 1,63 yang artinya peningkatan 1 rupiah pendapatan pemilik unit usaha akan mengakibatkan peningkatan sebesar 1,63 rupiah pada dampak langsung, tak langsung dan *induced* (berupa pendapatan pemilik usaha, tenaga kerja dan pengeluaran konsumsi di tingkat lokal). Angka tersebut menunjukkan dampak pengeluaran pengunjung terhadap perekonomian pemilik unit usaha dan tenaga kerja yang berada di objek wisata bukan pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan, bahwa keberadaan objek wisata ini secara nyata memberikan dampak ekonomi terhadap perekonomian masyarakat lokal sekitar lokasi tersebut. Nilai *multiplier* ini masih dapat ditingkatkan seiring dengan pengembangan objek wisata ini, peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal dan penyediaan barang yang diperlukan pengunjung oleh unit usaha yang ada. Hal ini dapat meningkatkan proporsi pengeluaran pengunjung di objek wisata yang berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perekonomian masyarakat lokal sekitar.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan konsep TALC yang dikembangkan oleh Butler, dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata di Pantai Lubang Buaya Morella masih berada dalam tahapan eksplorasi (*exploration*). Hal ini dapat dilihat dengan semakin menurun tingkat pendapatan masyarakat sekitar lokasi wisata, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat masih sangat sederhana. Ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk bagaimana destinasi wisata yang ada (wisata bahari, sejarah, dan wisata budaya) dapat dilestarikan dengan menjaga lingkungan dari kerusakan, menjaga kebersihan, melestarikan budaya leluhur, dan situs-situs sejarah untuk generasi yang akan datang. Dengan begitu pariwisata di Maluku umumnya dan khususnya di Desa Morella dapat berkembang ke arah yang lebih baik ke depannya.

Gagasan wisata halal pada destinasi Pantai Lubang Buaya Morella menjadi menarik untuk diterapkan. Destinasi wisata halal berpedoman pada penerapan ajaran dan prinsip Islam dalam

semua aspek kegiatan pariwisata (Battour & Ismail 2016). Dan temuan Battour & Ismail (2016) merekomendasikan destinasi, hotel dan resor, maskapai penerbangan, dan agen perjalanan direkomendasikan untuk memosisikan diri di pasar pariwisata halal. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk menjadikan destinasi muslim *friendly* oleh beberapa negara non-Muslim dapat memotivasi destinasi lain untuk menjadi muslim *friendly*. Sehingga tidaklah berlebihan bahwa Pantai Lubang Buaya Morella masih berada dalam tahapan eksplorasi (*exploration*) dapat menangkap peluang ini.

Daftar Pustaka

- Archer, B., & Cooper, C. (1994a). Education and Training (In: Witt, SF & Moutinho, L (eds), Tourism Management And Marketing Handbook, Second Edition, p.140-144.UK: Prentice Hall International (UK) Ltd.
- Archer, B., & Cooper, C. (1994b). Product Life Cycle in: Witt, SF & Moutinho, L (Eds), Tourism Management And Marketing Handbook, Second Edition, p.341-345. UK: Prentice Hall International (UK) Ltd.
- Ariyanto, E. (2004). Ekonomi Pariwisata. www.geocities.com. Diakses: Agustus 2021
- Ashley, C., & Goodwin, H. (2001). Pro-poor tourism strategies: Expanding Opportunities for the poor. London: Department for International Development.
- Badarneh, M. B., & Som, A. P. M. (2011). Factors influencing tourists' revisit behavioral intentions and loyalty. *International Journal of Business and Management*, 7(4), 4-26.
- Bagus, I. G. N., & Spillane, J. (1993). Cultural tourism and religious belief systems. *Cultural tourism and religious belief systems.*, 51-80.
- Battour, Mohamed & Ismail, Mohd Nazari (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives* 19. 150–154
- BPS. (2015). Provinsi Maluku dalam Angka 2015.
- Butler, R. (2004). The Tourism Area Life Cycle in the Twenty-First Century. A companion to tourism, 159-170.
- Cohen, E. (1974). Who Is a Tourist?: a Conceptual Clarification. *The Sociological Review*, 22(4), 527–555. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1974.tb00507.x>
- Dehoratius, N., & Rabinovich, E. (2011). Field research in operations and supply chain management. *Journal of Operations Management*, 29(5), 371–375. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2010.12.007>
- Deliarnov (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really Halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Hana, K. F., Ramadhani, E. S., & Adni, R. (2022). Halal Tourism: Keterkaitan Cira Destinasi, Fasilitas dan Norma Subjektif. *JIHBIZ: Journal of Islamic Economy, Finance and Banking*, 6(1), 69–80.
- Jurowski, C., & Brown, D. O. (2001). A comparison of the views of involved versus noninvolved citizens on quality of life and tourism development issues. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 25(4), 355 - 370.
- Karyono. A Hari (1997). *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo,

- Lapeyre, R. (2010). Community-based tourism as a sustainable solution to maximise impacts locally? The Tiseb Conservancy case, Namibia. *Development Southern Africa*, 27(5), 757-772.
- Liu, J. & Var, T. (1986). Resident attitudes towards tourism impacts in Hawai. *Annals of Tourism Research*, 13(2), pp. 193 - 214.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19(2016), 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>
- Pitana I Gede & Putu G, Gayatri (2005). *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Riyadi, Slamet (1982). *Pembangunan Dasar-Dasar dan Pengertiannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soerjono, Soekanto (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Dalam Abdulsyani, *Sosiologi Sistematis, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suratmo, Gunawan (2004). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Spillane. J. (1994). *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius
- Sheldon, P. J., & Abenoja, T. (2001). Resident attitudes in a mature destination: the case of Waikiki. *Tourism management*, 22(5), 435-443
- Som, A. P. M., & Badarneh, M. B. (2011). Tourist satisfaction and repeat visitation; toward a new comprehensive model. *International Journal of Human and Social Sciences*, 6(1), 38-45.
- Theobald, W. F., (2005). The Meaning, Scope, and Measurement of Travel and Tourism', in W. F. Theobald (eds), *Global Tourism* (3rd edition) (Butter worth-Heinemann/Elsevier, New York), pp. 524
- Tubaka. Y Salmin (2016). *Penelitian Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Komunitas Berbasis Potensi Lokal*
- Var, T. (1994). Tourism industry in Vietnam. *Annals of Tourism Research*, 21(2), 420-422.
- Yoeti, O. A. (2003). *Tours and Travel Marketing Cetakan Pertama*. Jakarta: Pradyna Paramitha.
- Walgito, Bimo (2002). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta